

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2020**

# *KATA PENGANTAR*

Penyajian laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kegiatan Tahun 2020 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, semoga dapat bermanfaat.

Kupang,      Januari 2021  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Ganef Wurgiyanto, A.Pi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631010 198903 1 030

# *RINGKASAN EKSEKUTIF*

Dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja suatu organisasi secara transparan, bersih, berhasil guna, perlu disusun laporan yang Akuntabel untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui indikator kinerja input, output, outcome dan benefit bahkan sampai impact.

Secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran dari 3 (Tiga) sumber dana masing-masing :

1. DPA dari APBD I

Total Anggaran DPA Tahun 2020 (Belanja Publik) sebesar Rp 52.617.758.528,- untuk 4 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan hasil akhir pencapaian realisasi fisik sebesar 93,84% dan realisasi keuangan 91,73% atau terealisasi sebesar Rp. 48.267.594.492,-

2. Dekonsentrasi APBN Pusat

Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. 1.614.132.000,- dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 95,58 % dan keuangan 95,09% atau Rp. 1.548.734.892,-

3. Dana DAK

Pengelolaan DAK untuk tahun 2020 yaitu Rp. 539.103.000 dengan realisasi keuangan Rp. 535.053.000 (99,99 %) dan realisasi fisik 100%;

4. Penerimaan PAD

PAD Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.218.866.162,- (37,01%) dari target sebesar Rp. 11.400.000.000,00,-.

# *DAFTAR ISI*

|                                                  |       |          |
|--------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                            | ..... | i        |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                       | ..... | ii       |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                | ..... | iii      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                        |       |          |
| A. Latar Belakang                                | ..... | 1        |
| B. Maksud dan Tujuan                             | ..... | 1        |
| C. Gambaran umum                                 | ..... | 1        |
| <b>BAB II. RENCANA STRATEGIS</b>                 | ..... | <b>3</b> |
| A. RENSTRA Organisasi                            | ..... | 3        |
| 1. Visi                                          | ..... | 3        |
| 2. Misi                                          | ..... | 3        |
| 3. Tujuan dan Sasaran                            | ..... | 4        |
| 3.1. Tujuan                                      | ..... | 4        |
| 3.2. Sasaran                                     | ..... | 4        |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019..... |       | 5        |
| C. Penetapan Kinerja 2019                        | ..... | 6        |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>            | ..... | <b>7</b> |
| A. Analisis capaian kinerja                      | ..... | 7        |
| a. Indikator Kinerja                             | ..... | 7        |
| b. Pengukuran Kinerja                            | ..... | 8        |
| B. Akuntabilitas keuangan                        | ..... | 14       |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b>                           |       |          |
| A. Kesimpulan                                    | ..... | 17       |
| B. Saran                                         | ..... | 17       |

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
2. Realisasi Kinerja (PKT) Tahun 2020.

# *BAB I*

## *PENDAHULUAN*

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk/format pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi pemerintah yang berisi informasi seputar pencapaian pelaksanaan rencana kerja.

Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

- Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan *good governance*, secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya LKIP ini adalah sebagai tindak lanjut (*respons*) terhadap Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya adalah mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Rencana Kerja Tahunan 2020.

### **C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102).

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 133 orang dengan 37 jabatan struktural dan fungsional umum sebanyak 96 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 orang Jabatan Eselon II/a;

- 5 orang Jabatan Eselon III/a;
- 7 orang Jabatan Eselon III/b;
- 24 orang Jabatan Eselon IV;
- 96 orang Fungsional Umum.

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- A. Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- B. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- C. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- D. Pembinaan dan perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- E. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- F. Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/habitat sumberdaya kelautan;
- G. Pengelolaan Unit Instalasi Teknis;
- H. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

# *BAB II*

## *RENCANA STRATEGIS*

### A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

#### 1. VISI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 3 mengenai urusan pemerintahan pilihan mengamanatkan bidang kelautan dan perikanan sebagai kewenangan pilihan karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya kerja keras dan kesungguhan hati, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur utamanya dan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan pada khususnya. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah: **“NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA DALAM BINGKAI NKRI”**

#### 2. MISI

Masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan, pemerataan, pertumbuhan dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pelaku ekonomi serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu Untuk itu misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty NTT*).

#### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, pada hakekatnya bertujuan untuk :

### **3.1. TUJUAN:**

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah:

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan;
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial;
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan;
- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan;
- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan.

### **3.2. SASARAN :**

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan, yang meliputi:
  - a. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan produk perikanan;
  - b. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan;
  - c. Meningkatnya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata di sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial, yang meliputi:
  - a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan;
  - b. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap layanan sektor perikanan dan kelautan.
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang meliputi: tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal;

- 4) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan, yang meliputi: tersedianya sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan, yang meliputi: meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan yang meliputi: meningkatnya sarana dan prasarana produksi perikanan;
- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
  - a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur sektor kelautan dan perikanan;
  - b. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi: meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan system pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.

## **B. RENCANA KINERJA**

Bertolak dari kebijakan umum di atas guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur, dapat dirumuskan 5 (lima) rencana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

### **1. Program Pengelolaan Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil**

Indikator :

- Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah

### **2. Program Program Pengolahan Perikanan Tangkap**

Indikator :

- Produksi Perikanan Tangkap

### **3. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Indikator :

- Produksi Perikanan Budidaya

### **4. Program Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Indikator :

- Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)

5. Program Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator :

- Angka Konsumsi Ikan

**C. PENETAPAN KINERJA 2020**

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Kinerja Tahun 2020 sesuai terlampir.

# *BAB III*

## *AKUNTABILITAS*

### *KINERJA*

#### **A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

##### **1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok :

##### **1.1. Masukan (*Inputs*)**

Segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana.

##### **1.2. Keluaran (*Outputs*)**

Segala sesuatu yang berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

##### **1.3. Hasil (*Outcomes*)**

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

##### **1.4. Manfaat (*Benefits*)**

Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat.

##### **1.5. Dampak (*Impact*)**

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang diawali oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya

mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran *ordinal* sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada tahun 2020 mengusulkan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan serta 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:

**1. Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya;**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

**2. Pengelolaan Perikanan Tangkap;**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

**3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil melalui pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

**4. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;**

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2020 telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

**1) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah;**

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Manfaat dari konservasi perairan terhadap perikanan yaitu dapat melindungi spesies ikan yang bernilai ekonomis serta

dapat menjaga stock ikan agar tetap terjaga, diperlukan peran pemerintah untuk menjaga potensi kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Luas kawasan konservasi di wilayah perairan NTT adalah 4.365.378,49 Ha dengan persentase 21,83% dari luas laut NTT. Sedangkan luasan kawasan konservasi yang dikelola oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 276.693 ha atau hanya 6,33% dari luas kawasan perairan di Nusa Tenggara Timur. Adapun Capaian indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat dilihat dari Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Prosentase Luas Kawasan Perairan Daerah**

| No | Indikator Kinerja                       | Satuan | Tahun Dasar 2019 | 2020    |            | Capaian % |
|----|-----------------------------------------|--------|------------------|---------|------------|-----------|
|    |                                         |        |                  | Target  | Realisasi  |           |
| 1. | Prosentase Luas Kawasan Perairan Daerah | Ha     | 182.889,88       | 183.389 | 276.693,38 | 150,88    |

Pada tahun 2020 target luasan kawasan konservasi perairan daerah sebesar 183.389 Ha dengan realisasi mencapai 276.693,38 Ha atau 150,88%. Peningkatan kawasan konservasi perairan daerah karena ditetapkan KKPD alor menjadi SAP (Suaka Alam Perairan) Selat Pantar dan Perairan Alor yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya.

## 2) Produksi Perikanan Tangkap

Dari luasnya perairan di Provinsi NTT, terdapat peluang sumber daya perikanan tangkap dengan potensi lestari sebesar 491.700 ton/tahun. Untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 17.248.983.900,- dengan realisasi Rp.15.941.228.000,-. Capaian Kinerja Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perikanan Tangkap**

| No | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Tahun Dasar 2019 | 2020   |           | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                   |        |                  | Target | Realisasi |             |
| 1. | Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | %      | 1                | 1,02   | 1,02      | 100         |

Prosentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 yaitu sebesar 172.520 Ton sedangkan target tahun 2020 yaitu 168.000 ton dengan tahun dasar 2019 sebesar 160.000 ton. Capaian kinerja produksi perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target sebesar 100 %.

### 3) Produksi Perikanan Budidaya

Sepanjang tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT mempunyai program strategis yaitu Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semau), Sea Ranching Ikan Kerapu dan Kakap (di Teluk Labuan Kelambu, Riung Kabupaten Ngada) dan Lele perkarangan. Adapun Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya**

| No | Indikator Kinerja                        | Satuan | Tahun Dasar 2019 | 2020   |           | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------|-------------|
|    |                                          |        |                  | Target | Realisasi |             |
| 1. | Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya | %      | 1,07             | 1,04   | 1,08      | 103,84      |

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebesar 2.010.895,23 Ton. Prosentase produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,08 % sedangkan target tahun 2020 yaitu 1.850.000 ton atau sebesar 1,04 dengan tahun dasar 2019 sebesar 1.800.000 ton atau 1,07% Capaian kinerja produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target sebesar 103,84 %.

### 4) Penurunan Kasus *IUU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported fishing)*

Wilayah perairan laut provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi sumberdaya ikan yang cukup besar yang terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yakni :WPP-NRI: 573, 713 dan 714,kondisi ini perlu dijaga, dikendalikan, dan dipertahankan agar supaya peningkatan yang terjadi akan semakin membaik dimasa yang akan datang. namun dalam pelaksanaannya disinyalir telah terjadi kegiatan *Over Fishing*. Hal ini antara lain disebabkan terjadinya penangkapan yang berlebihan dan cara penangkapan yang merusak lingkungan serta maraknya kegiatan IUU Fishing, Dalam tahun 2020 terjadi beberapa pelanggaran yang di tangani bidang PSDKP antara lain pelanggaran bidang perikanan (IUU Fishing) terdiri dari Illegal Fishing,

Un Reported dan Un Regulated, jumlahnya relatif banyak, khususnya untuk pelanggaran penangkapan ikan tanpa dokumen perikanan (dokumen perijinan sudah mati), dalam operasi bersama Lamtamal dan polisi perairan memeriksa 40 kapal, dari 40 yang memiliki kelengkapan adala 35 kapal dan 5 lainnya tidak dilengkapi dokumen. Adapun Capaian Kinerja penurunan kasus IUU Fishing (illegal, Unregulated, Unreported fishing) dapat dilihat pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported fishing)**

| No | Indikator Kinerja                                                         | Satuan | Tahun Dasar 2019 | 2020   |           | Capaian % |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------|-----------|
|    |                                                                           |        |                  | Target | Realisasi |           |
| 1. | Prosentase penurunan Kasus IUU (illegal, Unregulated, Unreported fishing) | %      | 45               | 55     | 87,5      | 159,09    |

Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Pemafaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2020 sebanyak 87,5 % di bandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 55 % di karenakan tingkat kesadaran nelayan telah baik, serta pera serta dinas Kelautan dan Perikanan serta aparat penegak hukum lainnya dalam mesosialisasikan hukum dan perundang-undangan. Capaian kinerja penurunan kasus IUU sebesar 159,09%.

## 5) Angka Konsumsi Ikan

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal penjaminan mutu, promosi dan distribusi produk perikanan pada tahun 2020 berdampak pada peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Nusa Tenggara Timur, Adapun Capaian indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat dilihat dari Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan**

| No | Indikator Kinerja           | Satuan          | Tahun Dasar 2019 | 2020   |           | Capaian % |
|----|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
|    |                             |                 |                  | Target | Realisasi |           |
| 1. | Kinerja Angka Konsumsi Ikan | Kg/Kapita/Tahun | 38,84            | 42     | 40,39     | 96,16     |

Kegiatan perhitungan Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2020 tidak mencapai target dikarenakan diadanya pemotongan anggran yang mendukung tingkat konsumsi ikan, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai

40,39 Kg/Kapita/tahun atau 96,16 persen dari target tahun 2020 sebesar 42 kg/Kapita/tahun.

### **3. Akuntabilitas Keuangan**

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 bersumber pada APBN, APBD dan DAK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a) Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.298.216.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.224.948.407,- atau 93,41% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Dukungan Pelaksanaan perizinan pesisir, survey/visitasi lokasi dan monitoring izin pesisir dengan pagu sebesar Rp. 65.500.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini memberikan konsekuensi kepada perorangan atau korporasi yang akan berusaha di wilayah perairan 0-12 mil harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu dimana rekomendasi izin harus dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Rekomendasi izin ini dikeluarkan setelah dilakukan visitasi lapangan. Lokasi kegiatan ini difokuskan pada perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini menghasilkan penerbitan 10 rekomendasi perizinan pengelolaan ruang laut.
  - Kegiatan Rehabilitasi Mangrove diharapkan terdapat keseimbangan ekosistem yang terbentuk dengan luasan area terlindungi sebesar 16 ha dengan pagu sebesar Rp. 102.058.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan Rehabilitasi mangrove ini dilakukan dengan menanam mangrove sebanyak 16.000 anakan daerah ekowisata tepatnya di Desa Lमतोकन Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. Sasarannya adalah masyarakat pesisir yang berada di sekitar wilayah mangrove yang mengalami kerusakan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat terjaga ekosistem pesisir dan lingkungan pesisir;
  - Evaluasi KKPD Sikka dengan lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Sikka dengan pagu sebesar Rp. 12.560.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.845.200,- atau sebesar 70%. Untuk mengoptimisasi pengelolaan KKPD yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Daerah perlu dilakukan

evaluasi terhadap seluruh aktivitas dan rencana penetapan secara terpadu sehingga dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus dilakukan agar tercipta kesinambungan. Hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik dalam rangka persiapan penetapan lahan seluas 42.250 ha.

- Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian Bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi berupa tali 1 orang @1 (satu) Roll ukuran 200 m dan bibit 1 (satu) orang @50 kg untuk 4.000 penerima dengan sasaran sebanyak 397 kelompok kepada pembudidaya dengan lokasi di Kabupaten Alor, Lembata, Sikka, Flores Timur dan Sabu Raijua yang terdiri dari 159 kelompok di Kabupaten Alor, 45 kelompok di Kabupaten Lembata, 30 kelompok di Kabupaten Flores Timur, 1 kelompok di Kabupaten Sikka dan 162 kelompok di Kabupaten Sabu Raijua. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut kepada para pembudidaya Rumput Laut dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat pada umumnya dan masyarakat NTT pada khususnya;
- Kegiatan persiapan rekomendasi SIUP dan SIKPI tidak dapat terlaksana
- Bantuan Paket Lele Pekarangan sebanyak 26 Paket di Kota Kupang sebanyak 1 (satu) paket @1.000 (seribu) ekor dengan sasaran masyarakat/rumah tangga/sekolah/lembaga agama dengan hasil tersalurnya bantuan paket lele pekarangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar 100%.
- Bantuan Sampan untuk kegiatan budidaya Rumput Laut, bantuan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit bagi pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Kupang (Kecamatan Semau, Semau Selatan, Sulamu dan Kupang);
- Program Strategis Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:
  - Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semau)  
Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya diperaikan secara langsung di ekosistem berbasis *aquaculture* dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dengan spesifikasi khusus berbentuk bulat, memiliki jarring untuk pemeliharaan dengan diameter 10 meter dengan kedalaman jarring 8 meter. Belanja hibah yang diserahkan kepada

masyarakat meliputi: benih Ikan Kerapu berukuran 10 cm sebanyak 100.000 ekor dan benih Ikan Kakap berukuran 10 cm sebanyak 125.000 ekor yang ditebar di Pulau Semau Kabupaten Kupang. Pakan yang diberikan sesuai ukuran benih diberikan selama 1-2 bulan awal ketika benih tiba di lokasi dan selama masa budidaya untuk pembesaran ikan.

- *Sea Ranching* Ikan Kerapu dan Kakap (di Teluk Labuan Kelambu, Riung Kabupaten Ngada)

*Sea Ranching* adalah upaya pelepas-liaran benih ikan pada suatu perairan untuk peningkatan biomassa dalam rangka pencapaian produksi pada suatu waktu tertentu. Diharapkan dalam 2-3 tahun kedepan perairan Labuan Kelambu tersebut dapat memiliki Sumberdaya Ikan (Produksi Ikan Kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang berlangsung di Labuan Kelambu hanya anggaran untuk pembelian pakan dan operasional saja.

- Budidaya Kerapu dan Kakap (Mulut Seribu)

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang berlangsung di Mulut Seribu hanya anggaran untuk pembelian pakan, operasional dan jarring keramba senilai Rp. 60.000.000,-.

- b) Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.298.216.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.491.228.000,- atau 89,80% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba

Frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba periode Januari-Desember 2020 sebanyak 2.873 kali yang terdiri dari kapal 0-30 GT. Pada Bulan Februari-April 2020 terjadi penurunan frekuensi kunjungan kapal hal ini dikarenakan sedang dalam suasana pandemi sehingga mengalami penurunan frekuensi kunjungan kapal yang mengakibatkan jumlah produksi menurun Kegiatan pendaratan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang dilakukan di dermaga periode Januari-Desember 2020 sebesar 3.071.911 kg dengan rata-rata 255.992 Kg/Bulan. Pada Bulan Februari dan Maret 2020 terjadi penurunan produksi ikan, hal ini disebabkan pandemi covid 19.

➤ Pelayanan perizinan dan Keterangan Berlayar

Pelayanan surat perijinan yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sementara surat keterangan meliputi: Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), Surat Keterangan Pelabuhan Pangkalan (SKPP), Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI), Rekomendasi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar di PPI Oeba ditandatangani oleh kesyahbandaran PPI Oeba. Jumlah SPB yang dikeluarkan oleh PPI Oeba selama tahun 2020 sebanyak 2.873. Pada tahun 2020 PPI Oeba menghasilkan PAD sebesar Rp. 1.386.052.720,- per Desember 2020. Untuk kegiatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan menghasilkan PAD sebesar Rp. 301.637.500,- yang terdiri dari tambat kapal, labuh kapal dan dokumen kapal. Selama periode Januari

Desember 2020 jumlah SKAI yang dikeluarkan oleh PPI Oeba sebanyak 159 surat, SKPI sebanyak 48 surat, SKPP 202 surat, Rekomendasi Bahan Bakar sebanyak 79 rekomendasi dan SKRD sebanyak 3.821.

➤ Rekomendasi dan Perizinan Bidang Perikanan Tangkap

Sepanjang Tahun 2020, bidang tangkap telah mengeluarkan beberapa jenis surat rekomendasi yang meliputi: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Jumlah rekomendasi dan perizinan periode Bulan Januari-Desember 2020 antara lain adalah sebagai berikut: SIPI 462, SIUP 84, SIKPI 20 rekomendasi, BPKP lokal sebanyak 1.145, BPKP Andon sebanyak 12, STKA sebanyak 13 dan SIPI ANDON sebanyak 262.

➤ Pengadaan Kapal 3 GT lengkap dengan alat tangkap sebanyak 65 unit dan pembangunan perahu motor tempel sebanyak 130 unit. Pagu anggaran senilai Rp. 13.612.320.150,- dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari dan pekerjaan selesai tanggal 27 Agustus 2020 yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

- c) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 696.305.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.631.455.300,- atau 91% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebanyak 9 orang guna membantu terlaksananya kelancaran kegiatan di bidang PSDKP sebesar Rp. 144.000.000,- dengan realisasi sebesar 100%;
- Pengawasan dan pemantauan pelaku usaha sebesar Rp.900.000,- dengan realisasi sebesar 100% dengan hasil terpantaunya kegiatan pelaku usaha di PPI Oeba dan PPP Tenau, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan bersama karantina ikan KKP dengan langsung sidak ke kantor atau gudang tempat pelaku usaha. Banyak hal yang ditemukan yang tidak sesuai dengan aturan dan para pelaku usaha tersebut dipanggil ke kantor DKP Provinsi NTT untuk kemudian dilakukan pembinaan dan penanda tanganan kesepakatan agar mau melakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Temu koordinasi aparat penegak hukum yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan anggaran sebesar Rp. 34.954.000,- dengan realisasi sebesar 100% dan hasil yang dicapai adalah terbitnya Keputusan Gubernur Nomor: 261/KEP/HK/2020 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2020-2025. Temu koordinasi ini melibatkan instansi dan aparat lingkup Provinsi NTT diantaranya: Polda, Lantamal, Kejaksaan Tinggi, KSOP, Pengadilan Tinggi SKPD lingkup Provinsi NTT dan stakeholder lainnya. Tujuan dari temu koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dan keterpaduan gerak dan langkah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan khususnya di wilayah NTT dan juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik bagi antar penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana yang cepat, tepat dan akuntabilitas;
- Temu Teknis Pengawas Perikanan/PPNS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan anggaran sebesar Rp. 17.181.000,- dengan realisasi sebesar 100% dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan pengawas perikanan/PNS tingkat Provinsi NTT. Peserta pengawas/PPNS dan Polsus Lingkup Provinsi NTT;
- Penyidikan perkara tidak pidana perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 13.577.000,- anggaran tersebut tidak dipergunakan hal ini dikaitkan dengan covid19 sehingga tidak ditemukan pelanggaran jadi yang kita lakukan hanya bersifat pembinaan saja sedangkan anggaran disetor ke kas Negara;

- Gelar operasi pengawasan pada lokasi *Destructive Fishing* secara intensif dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.073.000,- dengan hasil yang dicapai terlaksananya pengawasan *Destructive Fishing* di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba. Kegiatan ini melibatkan unsur terkait (DKP Kabupaten juga Polair setempat);
  - Pengawasan dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan anggaran sebesar Rp. 16.067.000,- terealisasi sebesar 100% dengan hasil yang dicapai adalah terpantaunya kegiatan pembangunan komersil di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang;
  - Gelar operasi pengawasan rutin dengan anggaran sebesar Rp. 148.950.000,- terealisasi sebesar 100% dengan hasil yang dicapai adalah terbinanya kapal nelayan sebanyak 33 kapal (tanpa kelengkapan dokumen juga yang sudah habis masa berlaku ijinnya);
  - Perbaikan kapal pengawas dengan anggaran sebesar Rp. 154.000.000,- terealisasi sebesar 100% dengan hasil yang dicapai adalah kapal yang rusak sudah dapat digunakan kembali dengan kondisi yang sudah baik;
  - Pemeliharaan rutin kapal pengawas dengan anggaran sebesar Rp. 28.703.000,- terealisasi sebesar 100% dengan hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kapal pengawas dengan mengganti/memperbaiki alat-alat yang rusak;
  - Pengadaan drone pengawas untuk *Destructive Fishing* kawasan konservasi perairan sebesar Rp. 32.800.000,- terealisasi sebesar 100% dengan hasil yang dicapai adalah diharapkan dengan adanya pengadaan drone pengawas tersebut patroli pengawasan di tahun 2021 mendapatkan hasil yang lebih maksimal;
  - Kegiatan lainnya (Pengadaan teropong, rompi dan senter untuk kelompok masyarakat pengawas) tidak dapat dilaksanakan karena anggaran terpotong/rasionalisasi Covid-19.
- d) Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.002.774.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 924.310.100,- atau 92,17% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan. Sedangkan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan

Ikan Yang Baik/ GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure* (SSOP)). Sepanjang Tahun 2020, bidang P3KP mengeluarkan 87 SIUP dan 28 SKP.

Alokasi Anggaran Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 52.617.758.528,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.267.594.492,- (95,53%) yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 13.048.609.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.841.422.664,- (90,75%) dan belanja langsung Rp. 39.569.149.528,- dengan realisasi Rp. 36.426.171.828,- (92,06%). Adapun Tabel Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Data PAD dapat dilihat di Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

**Tabel 3.6. Alokasi Dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran  
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020**

| No        | SUMBER DANA                                                                                                                      | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | %            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>APBD (Belanja Publik)</b>                                                                                                     | <b>52.617.758.528</b> | <b>48.267.594.492</b> | <b>91,73</b> |
|           | a. Belanja Tidak Langsung                                                                                                        | 13.048.609.000        | 11.841.422.664        | 90,75        |
|           | b. Belanja Langsung                                                                                                              | 39.569.149.528        | 36.426.171.828        | 92,06        |
| 1.1       | Program Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya                                                                            | 16.298.216.000        | 15.224.948.407        | 93,41        |
| 1.2       | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                                                                           | 17.248.983.900        | 15.491.228.000        | 89,81        |
| 1.3.      | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                            | 696.305.000           | 631.455.300           | 90,69        |
| 1.4       | Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan                                                                   | 1.002.774.000         | 924.310.100           | 92,18        |
| <b>2.</b> | <b>DAK</b>                                                                                                                       | <b>539.103.000</b>    | <b>535.053.000</b>    | <b>99,99</b> |
|           | <b>PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN</b>                                                 | 539.103.000           | 535.053.000           | 99,25        |
|           | Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus enam komoditas utama Pindang Ikan | 150.000.000           | 147.500.000           | 98,33        |

|           |                                                                                                                               |                                |                      |                      |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           | Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus enam komoditas utama Ikan Asap |                                | 150.000.000          | 147.500.000          | 98,33        |
|           | Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus enam komoditas utama           |                                | 150.000.000          | 147.500.000          | 98,33        |
| <b>3.</b> | <b>APBN</b> (Dekonsentrasi)                                                                                                   |                                | <b>1.614.132.000</b> | <b>1.548.734.892</b> | <b>95,95</b> |
|           | a.                                                                                                                            | Sekretariat Jenderal (01)      | 360.313.000          | 358.154.000          | 99,40        |
|           | b.                                                                                                                            | Ditjen Perikanan Tangkap (03)  | 167.555.000          | 167.555.000          | 100          |
|           | c.                                                                                                                            | Ditjen Perikanan Budidaya (04) | 322.178.000          | 322.174.892          | 99,99        |
|           | d.                                                                                                                            | Ditjen PSDKP (05)              | 437.742.000          | 414.129.000          | 94,61        |
|           | e.                                                                                                                            | Ditjen P2HP (06)               | 68.594.000           | 68.594.000           | 100          |
|           | f.                                                                                                                            | Ditjen KP3K (07)               | 257.750.000          | 218.128.000          | 84,63        |

**Tabel 3.7. Data PAD Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020**

| Jenis Penerimaan                                    | Target                | Target                | REALISASI<br>(Rp)    | %            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                                                     | Penerimaan<br>Awal    | Penerimaan<br>Revisi  |                      |              |
| 1                                                   | 2                     | 3                     | 4                    | 5            |
| <b>A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>       | <b>932.125.000</b>    | <b>932.125.000</b>    | <b>831.542.320</b>   | <b>54,37</b> |
| 1). a. Sewa Rumah Dinas                             | 1.625.000             | 1.625.000             | 1.800.000            | 60,00        |
| b. Bengkel UPMB                                     | 12.500.000            | 12.500.000            | 2.350.000            | 17,60        |
| 2). UPT LPPMHP                                      |                       |                       |                      |              |
| a. Sewa lab                                         | 300.000.000           | 300.000.000           | 1.800.000-           | 0,60         |
| 3). Pelabuhan Perikanan Pantai                      |                       |                       |                      |              |
| a. Sewa Rumah Dinas UPTD                            | 18.000.000            | 18.000.000            | 17.150.000           | 68,33        |
| b. Sewa Gedung/aula/asrama /air/alat/ tanah dll     | 600.000.000           | 600.000.000           | 808.442.320          | 81,59        |
| <b>B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b> | <b>17.300.000.000</b> | <b>9.300.000.000</b>  | <b>2.948.003.144</b> | <b>20,74</b> |
| 1). Kantor Dinas                                    |                       |                       |                      |              |
| a. PPI Oeba                                         | 1.800.000.000         | 1.800.000.000         | 1.280.178.792        | 35,85        |
| 2). UPTD Perbenihan Perikanan                       | <b>15.500.000.000</b> | <b>7.500.000.000</b>  | <b>1.667.824.352</b> | <b>22,24</b> |
| a. BBIS Noekele                                     | 5.000.000.000         | 3.000.000.000         | 25.715.000           | 0,86         |
| b. Tambak Oesapa                                    | 500.000.000           | 500.000.000           | 10.500.000           | 2,10         |
| c. BBIP Tablolong                                   | 10.000.000.000        | 4.000.000.000         | 1.631.609.352        | 40,79        |
| <b>C. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</b>           | <b>1.050.000.000</b>  | <b>1.050.000.000</b>  | <b>301.304.500</b>   | <b>28,70</b> |
| a. Tambat Kapal                                     | 350.000.000           | 350.000.000           | 126.665.000          | 36,19        |
| b. Labuh Kapal                                      | 350.000.000           | 350.000.000           | 79.434.500           | 22,20        |
| c. Dokumen                                          | 350.000.000           | 350.000.000           | 95.205.000           | 27,20        |
| <b>D. Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>            | <b>117.875.000</b>    | <b>117.875.000</b>    | <b>105.274.000</b>   | <b>89,31</b> |
| a. PPI Oeba                                         | 117.875.000           | 117.875.000           | 105.274.000          | 89,31        |
| <b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>                  | <b>19.400.000.000</b> | <b>11.400.000.000</b> | <b>4.186.123.964</b> | <b>36,72</b> |

# *BAB IV*

## *PERMASALAHAN YANG DIHADAPI*

### **4.1 Permasalahan Yang Dihadapi**

1. Untuk lebih meningkatkan produksi rumput laut maka di butuhkan sarana dan prasarana serta pendamping dilapangan;
2. Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya air tawar dikarenakan induk tidak dapat menghasilkan benih yang mencukupi yang disebabkan kurangnya debit air akibat kemarau panjang sehingga BBIS Noekele tidak dapat memproduksi benih yang akan didistribusikan ke masyarakat;
3. Untuk lebih dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap maka dibutuhkan peningkatan sarana penangkapan baik *restructurisasi* kapal dan peningkatan jumlah armada;
4. Belum ditetapkannya KKPD menjadi kawasan konservasi;
5. Belum siapnya distribusi dari daerah produksi ke daerah yang minum produksi ikan.

### **4.2 Upaya pemecahan Masalah**

1. Diperlukan pelatihan, pendampingan, menyediakan bibit unggul rumput laut, bantuan sarana pendukung berupa sampan bagi kelompok pembudidaya;
2. Diperlukan peningkatan debit air dengan cara melakukan pengeboran atau membuat jaringan sumber air dari bendungan dan penambahan calon induk yang unggul dan tersertifikasi serta meningkatkan bantuan benih unggul kepada masyarakat pembudidaya;
3. Diperlukan investor untuk mendatangkan kapal penangkap dari luar NTT dan meningkatkan bantuan sarapa penangkapan kepada masyarakat;
4. Diperlukan peningkatan status hukum dari pencadangan KKPD menjadi penetapan KKPD dengan SK Menteri KKP;
5. Perlu melaksanakan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan membuat jaringan distribusi produksi perikanan dan membangun fasilitas pasca panen berupa ICS (Integrated Coldstorage System) di kawasan pariwisata (*tourism estate*).

# *B A B V*

## *P E N U T U P*

### **5.1. Kesimpulan**

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 terealisasi sebagai berikut :

- a. Total Dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dari APBD I (Belanja Publik) mencapai Rp. 52.617.758.528,- Realisasi pelaksanaan selama Tahun 2020 secara keseluruhan mencapai dan Keuangan Rp. 48.267.594.492,- (91,73%);
- b. Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. 1.614.132.000,- dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 100% dan keuangan 95,95% atau Rp. 1.548.734.892,-;
- c. Realisasi komponen target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah :
  - Produksi Perikanan Tangkap sebesar 172.520 Ton sedangkan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 2.010.895,23 Ton;
  - Penerimaan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 4.186.123.964,- atau 36,72% dari target Rp. 11.400.000.000,-.

### **5.2 Saran**

Untuk mendukung peningkatan realisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan adanya : pelatihan, pendampingan, menyediakan bibit unggul rumput laut, bantuan sarana pendukung berupa sampan bagi kelompok pembudidaya; Peningkatan debit air dengan cara melakukan pengeboran atau membuat jaringan sumber air dari bendungan dan penambahan calon induk yang unggul dan tersertifikasi serta meningkatkan bantuan benih unggul kepada masyarakat pembudidaya; investor untuk mendatangkan kapal penangkap dari luar NTT dan meningkatkan bantuan sarana penangkapan kepada masyarakat; peningkatan status hukum dari pencadangan KKPD menjadi penetapan KKPD dengan SK Menteri KKP; dan distribusi dari daerah produksi ke lokasi wisata estate.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui berbagai kegiatan di Tahun 2020, semoga bermanfaat.